



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT**

**KOMISI IX DPR RI**

**(KEMENTERIAN KESEHATAN, KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI,  
BADAN POM, BKKBN, PT. ASKES, PT. JAMSOSTEK, DJSN DAN BNP2TKI)**

---

Tahun Sidang	: 2010-2011
Masa Persidangan	: III
Rapat ke	:
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat
Dengan	: Direktur Utama PT. Askes (Persero)
Sifat Rapat	: <b>Terbuka</b>
Hari/tanggal	: Senin, 31 Januari 2011
Waktu	: Pukul 10.00 s/d selesai
Acara	: 1. Laporan hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan pertanggungjawaban program Jamkesmas Tahun Anggaran 2010. 2. Laporan penggunaan dana <i>Corporate Social Responsibility (CSR)</i> Tahun 2010. 3. Membahas Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Umum (PJKMU) sebagai salah satu program penyelenggaraan pemeliharaan kesehatan yang dilakukan oleh PT. Askes (Persero).
Ketua Rapat	: dr. Ahmad Nizar Shihab, Sp.An/Wakil Ketua Komisi IX DPR-RI
Sekretaris Rapat	: Dra. Tri Udiartiningrum/Kabag Sekretariat Komisi IX DPR RI
Tempat	: Ruang Rapat Komisi IX DPR RI, Gedung Nusantara I Lantai 1 Jln. Jend. Gatot Subroto, Jakarta
Jumlah Kehadiran	: 34 orang dari 45 Anggota Komisi IX DPR RI 2 orang izin

**I. PENDAHULUAN**

Rapat Dengar Pendapat Komisi IX DPR-RI dengan Direktur Utama PT. Askes (Persero) dimulai pukul 10.15 WIB, setelah kuorum terpenuhi sesuai dengan Peraturan Tata Tertib pasal 245 ayat (1), rapat dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

**II. POKOK-POKOK PEMBICARAAN**

1. Direktur Utama PT. Askes (Persero) menyampaikan paparan sebagai berikut:
  - a. Pelaksanaan Manajemen Kepesertaan Jamkesmas Tahun 2010 meliputi :
    - Dasar Hukum Penyelenggaraan :

- ❖ Surat Menteri Kesehatan RI nomor : 1279/Menkes/XII/2009 tanggal 30 Desember 2009 Tentang Pengelolaan Manajemen Kepesertaan Program Jamkesmas 2010.
- ❖ Perjanjian Kerjasama antara Departemen Kesehatan RI dengan PT. Askes (Persero) Nomor HK/SKB/Menkes/018/2010 dan Nomor 05/KTR/0110 → Penugasan kepada PT. Askes (Persero)

b. Sasaran Program Kepesertaan :

- Masyarakat Miskin dan Tidak Mampu yang identitasnya ditetapkan dalam Keputusan Bupati/ Walikota.
- Peserta Program Keluarga Harapan (PKH).
- Masyarakat Miskin yang tidak mampu dalam Surat Keputusan Bupati/ Walikota dan tidak memiliki identitas (GEPENG dan anak terlantar) tetapi mendapat rekomendasi dari DINSOS Kab/ Kota.
- Masyarakat Miskin penghuni PANSOS, LAPAS dan RUTAN serta Masyarakat Miskin akibat Bencana Pasca Tanggap Darurat.
- Masyarakat Miskin lainnya yang ditetapkan oleh KEMENKES.

c. Tujuan Penyelenggaraan Program Kepesertaan :

- Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan masyarakat di Propinsi/ Kabupaten/Kota.
- Terjaminnya penyelenggaraan jaminan kesehatan dengan prinsip asuransi sosial 'managed care'.
- Berperan dalam Program Pemerintah menuju terselenggaranya Jaminan Kesehatan Nasional.

d. Prinsip Penyelenggaraan asuransi sosial :

- Menjamin ekuitas yaitu kesetaraan dalam memperoleh pelayanan kesehatan
- Menjamin portabilitas yaitu aksesibilitas terhadap pelayanan kesehatan yang tidak dibatasi oleh wilayah pemerintahan ataupun geografis
- Pelayanan kesehatan diselenggarakan dengan pola *managed care*
- Penyelenggaraan secara transparan, akuntabel, dengan menerapkan prinsip kehati-hatian.

e. Manfaat Program

- Terjaminnya akuntabilitas penyelenggaraan
- Terkendalinya biaya pelayanan kesehatan melalui :
  - Jaringan pelayanan terstruktur
  - Pelayanan kesehatan berjenjang melalui sistem rujukan (*referral system*).
  - Standarisasi pelayanan dan obat.
  - Pelaksanaan utilization review.
- Diperolehnya mutu pelayanan (*Quality Assurance*) melalui :
  - Mekanisme pengendalian mutu pelayanan melalui manajemen kontrol bersama antara PT. Askes, Pemda dan Dinas Kesehatan
  - Terjaminnya kontinuitas dan ketersediaan seluruh jenis pelayanan yang dibutuhkan oleh peserta.
- Jaminan portabilitas dan akseptabilitas dalam pelayanan kesehatan
  - Kerjasama PT. Askes (Persero) dengan Pemberi Pelayanan Kesehatan diseluruh Indonesia

- Rasa aman dan terlindungi dari sisi pembiayaan, karena tidak perlu uang tunai, cukup memperlihatkan kartu peserta.
- Peningkatan mutu layanan yang berkesinambungan, melalui :
  - Setiap keluhan dan ketidakpuasan akan ditangani, dan diselesaikan secara dini.
  - Forum Kemitraan sebagai media monitoring dan evaluasi yang melibatkan PT. Askes, Pemberi Pelayanan Kesehatan, dan Pemda yang secara periodik membahas progress review realisasi pelayanan.

f. Iuran dan Cakupan Manfaat

Iuran (PMPM)	PMPM (Rp)	CAKUPAN MANFAAT		
		KAB/KOTA	PROVINSI	NASIONAL
Terkecil	5.000	+	-	-
Terbesar	17.000	+	+	+

g. Sumber Dana PKBL Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PT Askes (Persero) tahun 2010 sebagai berikut:

- Program Kemitraan:
  - a. Saldo awal tahun 2010 = Rp 4.049.435.000,-
  - b. Bagian laba tahun 2009 (1,5 %) = Rp 32.653.788.000,-
  - c. Pengembalian pokok pinjaman = Rp 14.966.000.000,-
  - d. Pendapatan bunga = Rp 2.944.000.000,-
  - Jumlah = Rp 54.613.223.000,-
- Program Bina Lingkungan:
  - a. Saldo awal tahun 2010 = Rp 10.902.618.000,-
  - b. Bagian laba tahun 2009 (1,5 %) = Rp 32.653.788.000,-
  - c. Pendapatan bunga = Rp 250.000.000,-
  - Jumlah = Rp 43.806.406.000,-

h. Program Bina Lingkungan adalah bantuan yang diberikan dalam bentuk hibah, sebagai bentuk kepedulian PT Askes (Persero) terhadap masyarakat dan lingkungan di sekitar Perusahaan (CSR) dengan obyek bantuan meliputi:

- Bantuan bencana alam
- Bantuan pendidikan dan / atau pelatihan
- Bantuan peningkatan kesehatan
- Bantuan pengembangan prasarana dan / atau sarana umum
- Bantuan sarana ibadah
- Bantuan pelestarian alam

i. Realisasi Penyaluran Dana Program Kemitraan Per Provinsi Tahun 2009

No.	Regional	Provinsi	Jumlah Mitra Binaan	Nilai (Rp)
1	I	Aceh	36	960.000.000
2		Sumatera Utara	54	1.587.000.000

3	II	Sumatera Barat	71	1.983.000.000
4		Jambi	33	734.000.000
5		Riau	59	2.279.000.000
6		Kepulauan Riau	21	295.000.000
7	III	Sumbagsel	51	1.952.250.000
8		Babel	23	663.000.000
9		Bengkulu	32	721.000.000
10		Lampung	40	1.109.000.000
11	IV	DKI Jakarta	53	2.149.000.000
12		Banten	38	973.000.000
13		Kalimantan Barat	39	839.000.000
14	V	Jawa Barat	116	2.837.000.000
15	VI	Jawa Tengah	50	2.205.000.000
16		DI Yogyakarta	25	835.000.000
17	VII	Jawa Timur	95	2.945.000.000
18	VIII	Kalimantan Timur	32	1.460.000.000
19		Kalimantan Selatan	19	695.500.000
20		Kalimantan Tengah	47	1.590.000.000
21	IX	Sulawesi Selatan	94	2.687.500.000
22		Sulawesi Barat	33	1.005.000.000
23		Sulawesi Tenggara	17	660.000.000
24	X	Sulawesi Utara	25	1.217.000.000
25		Gorontalo	24	525.000.000
26		Sulawesi Tengah	13	570.000.000
27		Maluku Utara	18	500.000.000
28	XI	Bali	77	2.276.500.000
29		Nusa Tenggara Barat	32	152.500.000
30		Nusa Tenggara Timur	35	745.000.000

31	XII	Maluku	28	722.000.000
32		Irian Jaya Barat	13	601.000.000
33		Papua	37	1.355.000.000
		<b>Jumlah</b>	<b>1.380</b>	<b>41.828.250.000</b>

j. Rekap Realisasi Penyaluran Dana Program Kemitraan s/d Bulan Desember 2010

NO	SEKTOR USAHA	JUMLAH MITRA BINAAN	PENYALURAN
1.	Industri	87	3.259.000.000
2.	Perdagangan	755	21.778.250.000
3.	Pertanian	9	251.300.000
4.	Peternakan	30	936.000.000
5.	Perkebunan	5	155.000.000
6.	Perikanan	15	405.000.000
7.	Jasa	421	13.170.700.000
8.	Koperasi	35	1.458.000.000
9.	Cluster	23	415.000.000
	<b>JUMLAH</b>	<b>1.380</b>	<b>41.828.250.000</b>

k. Program Bina Lingkungan PT Askes (Persero) Seluruh Indonesia:

NO	PROGRAM	TOTAL BIAYA (RP)	KETERANGAN
1	Bencana Alam	585.146.962	
2	Pendidikan & Pelatihan	6.851.773.857	Pemberian bantuan kepada anak PNS Gol I dan II setingkat SLTA (2000 orang) & Perguruan Tinggi (1000 orang) senilai Rp. 5 M
3	Peningkatan Kesehatan	2.380.748.357	

4	Prasarana Sarana Umum	2.337.130.871	
5	Sarana Ibadah	8.701.111.080	
6	Pelestarian Alam	958.397.886	
7	Bina Lingkungan Peduli	1.130.140.000	
	Jumlah :	22.944.449.013	

2. PT. Askes (Persero) akan melakukan koordinasi dengan Kementerian Kesehatan berkaitan dengan kebijakan pelayanan kesehatan gratis bagi pasien kelas III rumah sakit dan meningkatkan perbaikan pelayanan dengan memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan program Jamkesmas di lapangan yang terkait dengan kewenangan PT. Askes (Persero).
3. PT. Askes (Persero) akan menyampaikan laporan keuangan tahun 2010 yang telah diaudit kepada Komisi IX DPR RI, mengingat pelaksanaan audit tersebut selesai pada bulan Maret 2011, maka laporan keuangan tersebut akan disampaikan paling lambat bulan April 2011. .
4. Dalam pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Umum (PJKMU), PT. Askes (Persero) agar membuat grand design PJKMU, meningkatkan prosentase pembiayaannya, memperluas cakupan pelayanan termasuk untuk pelayanan medic hyperbaric, dan menyampaikan data hasil capaian PJKMU di seluruh daerah di Indonesia, serta kendala dalam pelaksanaannya.
5. PT. Askes (Persero) agar lebih transparan dalam pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL), meningkatkan prosentase dananya, kejelasan mengenai kriteria yang dipersyaratkan bagi masyarakat yang ingin berpartisipasi dalam PKBL, dan mendistribusikan secara proporsional ke seluruh daerah di Indonesia.

### III. KESIMPULAN

1. Komisi IX DPR RI meminta PT. ASKES (Persero) untuk memberikan *grand design* pengembangan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Umum (PJKMU) dan data lengkap pelaksanaannya dalam rangka mempersiapkan diri berlakunya Undang-undang tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
2. Komisi IX DPR RI meminta kepada PT. ASKES (Persero) untuk menyampaikan laporan keuangan PT. ASKES tahun 2010 yang sudah diaudit secara tertulis, paling lambat bulan April 2011.
3. Komisi IX DPR RI meminta kepada PT. ASKES (Persero) untuk terus meningkatkan perbaikan pelayanan dengan memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan program Jamkesmas di lapangan yang terkait dengan kewenangan PT. ASKES.
4. Komisi IX DPR RI meminta kepada PT. ASKES (Persero) untuk mendistribusikan program kemitraan dan bina lingkungan secara proporsional ke seluruh daerah di Indonesia.

5. Komisi IX DPR RI meminta kepada PT. ASKES (Persero) untuk meningkatkan cakupan pelayanan sesuai dengan SK Menkes Nomor : 120/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Medik Hyperbarik.

**Rapat diakhiri pukul 13.25 WIB**

PIMPINAN KOMISI IX DPR RI  
Wakil Ketua,



dr. AHMAD NIZAR SHIHAB, Sp.An

